

Kampus Utama

Andita A



ILMI



ADMINISTRASI PUBLIK



Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3626326012

Submission Date

Aug 12, 2026, 2:09 PM GMT+7

Download Date

Aug 12, 2026, 2:14 PM GMT+7

File Name

Proposal_Andita_Apriliyah_Revisi_fix.pdf

File Size

279.5 KB

5 Pages**3,531 Words****22,818 Characters**

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Submitted works
- Internet sources

Exclusions

- 9 Excluded Matches

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 19%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 19% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Eppy Dian Pitono, Isnaini Rodiyah. "Simplifying Child Identity Card Services throu...	2%
2	Publication	M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Abdurrahman Abdurrahman, Mardiah...	1%
3	Publication	Sudirman H Lubis, - Nurhayati, Henny Herawati. "KAJIAN INFRASTRUKTUR PERDE...	1%
4	Publication	Moh Imam Muchyiddin, Indah Sulistiyowati. ""Internet of Things (IoT) Based Disi...	1%
5	Publication	Arif Abraham Liem, Aplonia Pala, Nikolaus Uskono. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ELE...	1%
6	Publication	Suroso - Suroso. "Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa ...	<1%
7	Publication	Witri Rahayuni, Zaili Rusli. "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ...	<1%
8	Publication	Latifatul Aini, Evi Rinata. "Effectiveness of Acupressure and Eucalyptus Oil for Tod...	<1%
9	Publication	Neli Indriyani Choerun Nisa, Zaula Rizqi Atika, Chamid Sutikno, Indah Ayu Perma...	<1%
10	Publication	Sri Haryati, Fauziah Hanum, Heylen Amildha Yanuarita. "EVALUASI PENGELOLAA...	<1%
11	Publication	Mardi Kogoya, Agustinus B. Pati, Joyce Rares. "Implementasi Program Pembagun...	<1%

12	Publication	Susi Setianingsih, Indriati Amarini. "ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN INFRAS...	<1%
13	Publication	Muafah Nur Romadhoni, Isnaini Rodiyah. "Efektivitas Sistem Informasi Desa dala...	<1%
14	Publication	Yuliyanti, Eka. "Peningkatan Firm Value Melalui Corporate Social Responsibility d...	<1%
15	Publication	Rifa'I, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan...	<1%
16	Publication	Vira A. Kantale, Agus T. Poputra, Heince R. N. Wokas. "Analisis akuntabilitas peng...	<1%
17	Publication	Putri Rezkia Salam, Hardianto Hawing, Muhammad Randhy Akbar. "Tata Kelola P...	<1%
18	Publication	Rahmatullah, Mamat. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Ran...	<1%
19	Publication	Laksmi Putri Widyaningtias, Ilmi Usrotin Choiriyah. "Implementasi Penggunaan ...	<1%
20	Publication	Muhamad Budiman Johra. "SOFT CLUSTERING DENGAN ALGORITMA FUZZY K-MEA...	<1%
21	Publication	Fitri Oviyanti, Maryamah Maryamah, Era Afriza, Uswatun Hasanah, Hafizh Maula...	<1%
22	Publication	Komir Bastaman, Ade Nawawi, Taharudin Taharudin. "Efektivitas Program Desa ...	<1%
23	Publication	Alfiani Udis'tia, Ilmi Usrotin Choiriyah. "Implementasi E-Government Melalui Pela...	<1%
24	Publication	Kantirina Rachaju. "Program Pemberdayaan Pemerintah Dalam Meningkatkan K...	<1%
25	Publication	Neti Ardila Tafonao, Junaidi Junaidi, Junaidi Junaidi, Fandi Alfiansyah Siregar, Fan...	<1%

26	Publication	I Made Utama Jaya Wiguna, A.A.N. Eddy Supriyadinata Gorda. "Menakar Aspirasi ...	<1%
27	Publication	Ni'matus Hilda Salsabillah, Lailul Mursyidah. "Efektivitas Sistem Informasi Manaj...	<1%
28	Publication	Octavian Hendra Priyatno, Anjar Mukti Wibowo. "Pola Kepemimpinan Kepala Des...	<1%
29	Publication	Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa D...	<1%
30	Publication	Sekar Ayu Purwanti, Isnaini Rodiyah. "Community Cadres Roles in Larvae Monitor...	<1%
31	Publication	Aprillia A Rosang, Johnny Hanny Posumah, Rully Mambo. "PENYUSUNAN PERENC...	<1%
32	Publication	Ashma Fiya Alfiyyah, Lilis Lilis, Akhmad Akhmad, Asri Jaya. JURNAL EKONOMI SAK...	<1%
33	Publication	Novia Serina Pakelo, Ivonne Saerang, Joy Tulung. "EVALUASI PROGRAM PEMBAN...	<1%

The Effectiveness of the Infrastructure Development Program as an Effort to Improve Public Services

[Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik]

Andita Apriliyah¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. This document describes guidelines for Authors in writing an article in UMSIDA. This abstract section should be

Keywords - author guidelines; UMSIDA Preprints Server; article template

Abstrak. Dokumen ini menjabarkan petunjuk bagi Penulis dalam menyusun artikel di UMSIDA Preprints Server. Bagian

Kata Kunci - petunjuk penulis; UMSIDA Preprints Server; template artikel

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran sentral dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai kawasan permukiman masyarakat, desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Desa merupakan sebuah komunitas sosial dan bentuk pemerintahan lokal yang telah ada sejak jauh sebelum terbentuknya Indonesia [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem NKRI. Pengaturan mengenai kelembagaan desa, yang meliputi pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa, turut memperkuat posisi strategis desa dalam sistem pemerintahan.

Sebagai organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan, pembangunan desa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan memperhatikan pencapaian kebutuhan dasar, seperti pengembangan infrastruktur di desa, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Pada umumnya pembangunan infrastruktur di desa merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap pembangunan. Salah satu instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenihnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat utama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur di desa juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomin masyarakat desa, seperti dengan adanya listrik yang memadai, lahirnya industri kecil dan menengah di desa, dan membuka lapangan kerja baru.

Pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa juga memiliki tantangan, seperti perencanaan yang berdimensi jangka pendek dan rendahnya rasa memiliki masyarakat desa yang menganggap prioritas manfaat dana desa adalah adanya cash yang diterima. Perencanaan yang berdimensi jangka pendek pembangunan infrastruktur desa sering kali dilakukan dengan perencanaan yang berfokus pada jangka pendek, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal. Sense of belonging masyarakat desa masyarakat desa sering menganggap bahwa prioritas manfaat dana desa adalah adanya cash yang diterima, sehingga tidak memperhatikan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun secara optimal.

Pelayanan publik mencerminkan kepercayaan publik, pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai melalui keterbukaan dan pengelolaan yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan integritas di mata masyarakat dan untuk mewujudkan legitimasi publik. Di Indonesia kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan publik semakin menjadi perhatian karena cenderung tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Padahal, dampaknya sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya [2]. Pelayanan tersebut dapat berupa regulasi maupun berbagai bentuk pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik [3]. Pelayanan publik dapat dianggap berkualitas jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kepastian hukum. Pelayanan publik ini mencakup aspek pemenuhan fasilitas umum, penyelenggaraan pendidikan, penanganan masalah sosial, layanan kependudukan, administrasi sipil, isu ketenagakerjaan, dan layanan dasar lainnya. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan salah satunya melalui pembangunan desa.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong [4]. Selanjutnya pasal 82 undang-undang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu) tahun sekali, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam penunjang kemajuan desa. Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur sangat berpengaruh pada keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi terutama dalam menunjang kebutuhan masyarakat desa [5].

Tujuan dalam pembangunan perdesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan perdesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dapat di rumuskan pembangunan perdesaan di tunjukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berperan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan [6]. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan pada bidang ekonomi serta kemampuan usaha secara berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat indonesia secara keseluruhan [7].

Pembangunan di wilayah perdesaan, tentunya ada beberapa jenis pembangunan, yang terdiri dari pembangunan fisik dan non-fisik atau dengan kata lain dari segi pembangunan fisik dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), serta pembangunan dari segi sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan program infrastruktur desa di indonesia menggunakan dana desa telah menunjukkan beberapa hasil positif. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, serta sarana dan prasarana desa. Keberhasilan infrastruktur menggunakan dana desa dapat dilihat dari beberapa faktor seperti, Pengembangan sumber daya manusia, pemerintah desa melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa, termasuk keterampilan pertanian, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Pengelolaan dana desa yang efektif, pemerintah desa harus berupaya untuk mengelola dana desa secara efektif dan transparan. Partisipasi masyarakat, masyarakat desa harus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa.

Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki fokus pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur fisik Desa Kalipecabean saat ini dicirikan oleh program pembangunan dan peningkatan kualitas aksesibilitas jalan lingkungan yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pembenahan jaringan jalan pemukiman melalui program pavingisasi,

drainase, infrastruktur olah raga, pengolahan sampah, dan Kios BUMDesa. Berikut merupakan data pembangunan infrastruktur Desa Kalipecabean Tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pembangunan Infrastruktur Desa Kalipecabean Tahun 2023-2025

No	Tahun	Program/Kegiatan	Anggaran	Prosentase	Total Anggaran
1	2023	Pembangunan Paving jalan RT 03 RW 01	Rp 50.000.000,00	88,02%	Total Anggaran Tahun 2023 Rp. 677.338.220,-
2		Pembangunan Paving Jalan RW 06	Rp 25.000.000,00		
3		pembangunan saluran pembuangan RT 18 RW 04	Rp 70.940.410,00		
4		pembangunan gorong-gorong RT.15 RW 04	Rp 20.000.000,00		
5		Pembangunan gorong-gorong RT 05 RW 02	Rp 16.000.000,00		
6		Pembangunan balai RW 5	Rp 251.397.810,00		
7		Pembangunan Kantor SSB Pendowo	Rp 50.000.000,00		
8		Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Rp 50.000.000,00		
9		Pembangunan kios desa	Rp 144.000.000,00		
10		Pemeliharaan Pendopo Balai Desa	Rp 139.269.500,00		
11	2024	Pembangunan Pavingisasi Jalan Gang RT 06 RW 02	Rp 46.580.000,00	84,15%	Total Anggaran Tahun 2024 Rp. 878. 919.960,-
12		Pembangunan Pavingisasi jalan RT 13 RW 03	Rp 19.676.900,00		
13		Pembangunan Drainase RT 13 Rw 03	Rp 27.762.500,00		
14		Pembangunan Drainase RT 16 RW 04	Rp 23.328.500,00		
15		Pembangunan Drainase RT 06 RW 02	Rp 17.233.000,00		
16		Pembangunan Drainase RT 05 RW 02	Rp 10.000.000,00		
17		Pembangunan Drainase Kios Desa	Rp 9.825.750,00		
18		Pembangunan balai RW 5	Rp 251.397.810,00		
19		Pembangunan WC Umum/MCK umum	Rp 11.326.000,00		
20		Pembangunan Tungku Pembakaran Sampah	Rp 98.220.000,00		
21	2025	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Rp 50.000.000,00	86,02%	Total Anggaran Tahun 2025 Rp. 945. 664. 626,-
22		Pembangunan kios desa	Rp 174.300.000,00		
23		Pembangunan Paving Rt 01 Rw 01	Rp 34.355.000,00		
24		Peninggian Paving Rt 02 Rw 01	Rp 22.300.000,00		
25		Peninggian Paving Rt 06 Rw 02	Rp 38.059.000,00		
26		Pembangunan Paving Rt 10 Rw03	Rp 93.883.000,00		
27		Peninggian Paving Rt 10 Rw 03	Rp 64.983.000,00		
28		Peninggian Paving Rt 13 Rw 03	Rp 28.225.000,00		
29		Pembangunan Paving Rt 15 Rw 04	Rp 35.964.000,00		
30		Peninggian Paving Rt 15 Rw 04	Rp 70.017.000,00		
31		Peninggian Paving Rt 16 Rw 04	Rp 198.822.000,00		
32		Rehab Balai Desa	Rp 108.270.654,00		
33		Peninggian Jalan Rt 10,13 Rw 03	Rp 78.704.222,00		
34		Pembangunan Paving Rt 10 Rw 03	Rp 66.000.000,00		
35		Peninggian Paving Rt 13 Rw 03	Rp 79.106.750,00		
36		Rehab Balai Rw 03	Rp 10.000.000,00		
37		Rehab Drainase Rt 12 Rw 03	Rp 7.175.000,00		
38		Normalisasi Saluran Air Rt 01,02,03,04 Rw 01 dan Rt 05 Rw 02	Rp 9.800.000,00		

Sumber : Pemerintah Desa Kalipecabean, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2023 hingga 2025 jumlah program pembangunan infrastruktur Desa Kalipecabean jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat satu program yang belum terrealisasikan yaitu pembangunan balai RW 5 dikarenakan belum mendapatkan izin dari dinas terkait. Sehingga dari tahun 2023 hingga saat ini masih belum dapat terproses sebagaimana mestinya. Jumlah anggaran pada setiap tahunnya mengalami peningkatan hal tersebut mencerminkan bahwa di Desa Kendalpecabean terus mengembangkan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Pada observasi awal penulis menjumpai beberapa permasalahan terkait Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Pertama, Kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan proyek infrastruktur, terutama

yang melibatkan anggaran besar, belum memadai. Kedua, Penggunaan TPST yang belum maksimal. Ketiga, realisasi pembangunan paving tidak sesuai dengan rencana awal. .

Dalam mengkaji terkait Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik keberadaan teori sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007). Sutrisno mengungkapkan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program yaitu. (1) Pemahaman Program, dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program. (2) Tepat Sasaran, dilihat dari apakah diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan. (3) Tepat Waktu, dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan. (4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan. (5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat [8].

Berdasarkan permasalahan diatas, keberadaan penelitian terdahulu menjadi hal yang penting. Pertama, penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid-19” Oleh Helena Afriani Rama Tahun 2022 dijumpai hasil pembangunan infrastruktur yang ada di desa goreng meni kecamatan lamba leda kabupaten manggarai timur jika dilihat dari 3 indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan sudah tepat sasaran.tetapi belum terlalu efektif, mungkin karena kendala covid-19, untuk indikator yang kedua yaitu integrasi dimana program tersebut sudah di sosialisasikan kemasyarakat desa goreng meni,kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaan dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan kenyataannya. Pembangunan di desa goreng meni bisa dikatakan lumayan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah lumayan meningkat antara lain akses jalan,transportasi juga meningkat karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrastruktur jalanterlebih dahulu sehingga pada tahap selanjutnya bisa berjalan lancar tanpa menjadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini di jadikan permasalahan [9].

Kedua, penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro” Oleh Yuliani Mangerongkonda Tahun 2023 dijumpai hasil efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari pencapaian tujuan : dari hasil yang di dapatkan di lapangan berdasarkan indicator pencapaian tujuan belum mencapai tujuan karna masalah yang timbul akibat transparasinya anggaran dan program pemerintah yang belum semuanya yang terealisasi dengan baik dan benar. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari tingkat kepuasan : maka tingkat kepuasan dari masyarakat yang masih kurang akibat ketidaktransparannya pemerintah terhadap anggaran program pembangunan infrastruktur desa [10].

Ketiga, Penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Mamuju” Oleh Putri Tahun 2023 dijumpai hasil Pelaksanaan program pembangunan di Desa Bonehau Kabupaten Mamuju dikategorikan efektif sebab empat tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain akses transportasi, fasilitas pendidikan dan serta infrastruktur lainnya, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada urgensi dari kebutuhan infrastruktur masyarakat itu sendiri [11].

Keempat, Penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo “ oleh Arik Atus Solikah dan Isna Fitria Agustina tahun 2025 dijumpai hasil efektivitas dana desa terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo sudah dikategorikan sangat efektif menunjukkan bahwa dana desa yang teralokasi untuk terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan target. Dari hasil kuisioner responden menunjukkan bahwa dana desa dapat berefek secara langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. Adanya pemanfaatan dana desa yang maksimal dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa dapat menekan angka kemiskinan, terlaksananya berbagai pembangunan dan pembaharuan fasilitas desa dan masyarakat yang dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat desa [12]. Tujuan dari penelitian saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian menggunakan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman informan [13]. Lokasi penelitian berada di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalipecabean setiap tahunnya mengalami peningkatan. Fokus utama penelitian adalah pada teori Efektivitas Pembangunan Infrastruktur menurut Sutrisno (2007) dengan indikator Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan percakapan dengan individu yang terlibat dalam Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur. Sedangkan Sumber Data Sekunder mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan situs web yang berhubungan langsung dengan penelitian efektivitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [14]. Berdasarkan kebutuhan spesifik, dapat memberikan wawasan tentang masalah yang ditemui selama penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Kesra serta masyarakat penerima manfaat di Desa Kalipecabean. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Hubberman, yaitu Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi empat langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [15].

REFERENSI

- [1] Suprianto, A., & Syafhendry. (2016). Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, Volume II*, Pages 14. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1786/1113>.
- [2] A. Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," *Otoritas J. Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 2, pp. 81–90, 2011, doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- [3] E. Wahyuni, N. M. Afistha, and E. R. Nawangsari, "Model Peningkatan Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah di Indonesia," *J. Sos. Ekon. dan Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2020, [Online]. Available: <http://www.jsep.org/index.php/jsep/article/view/1/7>.
- [4] Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- [5] Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- [6] Willar, D. (2019). *Penerapan Konstruksi Berkelanjutan Pada pembangunan Infrastruktur*. manado: polimdo press.
- [7] Srihardjono, N. B. (2019). Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Usaha Masyarakat. *Jurnal Reformasi* 9, No.2.
- [8] Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [9] Helena Afriani Rama. Esa Wahyu Endarti. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Sektor Publik* Vo. 2 No. 3.
- [10] Yuliani Mangerongkonda dkk. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 5 No. 74.
- [11] Putri, F. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Mamuju, 84.
- [12] Arik Atus Solikah dan Isna Fitria Agustina. 2025. Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. *Archive.Umsida.ac.id*.
- [13] Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- [14] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.